



SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah



SABTU PON, 24 MARET 2018
TAHUN 69 NO. 040 ■ TERBIT 28 HALAMAN

1

Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp. 3.999

Koalisi PDIP-Demokrat Terancam Kandas



M Yulianto

SM/dok

Dua Kubu Perlu Menahan Diri

JAKARTA - Koalisi yang masih dijajaki antara Partai Demokrat dan PDIP terancam kandas. Terlebih, jika kedua elite partai terus saling serang soal kasus korupsi E-KTP.

Pengamat Politik Universitas Diponegoro Semarang M Yulianto mengatakan sebagai tanda komunikasi kedua pimpinan parpol, SBY dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum sepenuhnya baik, meski-

pun elite kedua partai terlihat akrab. "Belum ada *chemistry* dan saya lihat sulit. Pada 2004, saat kontestasi Pilpres, nampaknya muncul problem personal. Akibatnya, komunikasi tak sepenuh hati dan masih sekadar basa-basi," kata Yulianto, Jumat (23/3).

Menurutnya, gaya bahasa dan bahasa tubuh Megawati terkait upaya Demokrat menjadi partai koalisi nampaknya tak mudah diterima.

PDIP dinilai masih tidak nyaman bergandengan dengan Demokrat, apalagi memasangkan calon presiden dari PDIP dengan calon wakil presiden dari Demokrat.

"Tambah lagi, muncul ketegangan ini. Efeknya pada renggangnya hubungan politik berikutnya. Ada halangan," terangnya.

Mengingat pengaruh kasus ini pada elektabilitas dan nama baik partai, maka hubungan keduanya bisa saja semakin meruncing.

Pada tahun-tahun politik citra

partai akan sangat mempengaruhi suara pemilih. Yulianto juga menilai, Demokrat memanfaatkan kasus ini untuk menunjukkan kekuatan di depan PDIP serta meningkatkan nilai tawar.

Demokrat juga seolah menunjukkan, tidak semua partai itu bersih. Apalagi posisi PDIP saat ini sebagaimana masa pemerintahan SBY, memegang tampuk kekuasaan.

"Lontaran kritik pada PDIP menaikkan posisi tawar Demokrat. Menunjukkan jika mereka memiliki power dan kemampuan untuk membangun opini," katanya.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Koalisi...

(Sambungan hlm 1)

Namun ketegangan di level elite DPP partai dia nilai, tak akan berimbas di level daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, disiplin partai tak berjaan sepenuhnya, dipengaruhi faktor politik lokal, kedekatan komunikasi, maupun kultur daerah.

Pada Pilgub Jateng, Demokrat berkoalisi dengan PDIP.

Lalu apa yang harus dilakukan PDIP atas pernyataan Setnov? Sebagai partai pemerintah PDIP diminta melakukan komunikasi politik yang terbuka. Menjelaskan secara terbuka apakah ada kader yang terlibat atau tidak.

Lontaran Setnov

Sebulan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan siap berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2019.

Hubungan kedua elit partai meruncing setelah dalam persidangan Setya Novanto menyebutkan nama-nama penerima uang hasil korupsi E-

KTP.

PDIP menyebut Demokratlah yang paling bertanggung jawab karena proyek E-KTP berjalan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sementara elite Demokrat meminta PDIP tak cuci tangan dan berjiwa besar dengan tak melindungi kadernya yang terlibat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini, ibarat cuci tangan PDIP untuk melindungi Puan Maharani dan Pramono Anung yang disebut Setya Novanto turut menerima dana E-KTP.

Selain itu, argumentasi Hasto yang menyebut partai oposisi tidak mungkin korupsi proyek pemerintah, dinilai Hinca sebagai argumentasi dangkal, lemah, dan mengada-ada.

Hinca juga heran dengan Hasto, yang dianggap tidak memahami tindak pidana korupsi dalam sebuah kebijakan. Hinca mengatakan, korupsi merupakan tindakan pribadi. Karena itu, tak bisa menyalahkan partai penguasa atau

pemerintah yang tengah berkuasa.

"Tidak ada yang sekarang langsung menyalahkan Pemerintahan Pak Jokowi. Parpol yang kadernya tersangkut korupsi menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum tanpa menyalahkan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang berposisi atau yang sedang berkuasa," kata Hinca.

Dengan pernyataan Hinca tersebut, prediksi M Yulianto soal penjajakan koalisi Demokrat-
PDIP bakal kandas semakin kuat.

Prediksi ini juga senada dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifudin Hasan. Syarifudin mengatakan, pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaitkan kasus E-KTP dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganggu wacana koalisi di Pemilu 2019.

"Kalau dibilang mengganggu, ya sangat mengganggu rencana kami ke koalisi Pemilu 2019," kata Syarif.

Mantan Menkop UKM itu menyebut, Hasto

seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Selain itu, juga harus memahami bahwa masalah korupsi E-KTP bukan ada pada pemerintahan SBY atau Partai Demokrat.

Kebijakan untuk membangun sistem E-KTP dibuat sesuai dengan UU dan merupakan program nasional. Kasus korupsi yang terjadi pada proyek pengadaan untuk program E-KTP itu lebih pada persoalan individu.

"Jadi jangan malah dibalik-balik menjadi masalah kebijakan pemerintah, karena ini masalah individu-individu yang menyimpang dari aturan. Ini yang harus dipahami jangan dengan mudahnya menyalahkan pihak lain," kata Syarif.

Mengenai tuduhan Setya Novanto terhadap Ketua DPP PDIP non-aktif Puan Maharani dan mantan Sekjen PDIP Pramono Anung, dia menilai hal tersebut tidak usah terlalu dipolemikkan. Sebaiknya, diserahkan kepada pembuktian di pengadilan.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta dua kubu menahan diri seraya sama-sama memastikan bahwa kader kedua partai tidak terlibat praktik korupsi.

"Bukan justru saling menuduh," kata Juru bicara PSI Dini Shanti Purwono.

Menurutnya, PDIP dan Partai Demokrat adalah dua partai besar yang menjadi rujukan jutaan rakyat Indonesia. PSI khawatir, perseteruan terbuka antara dua partai besar ini, bukan saja memecah bangsa, melainkan juga memperlemah upaya melawan korupsi.

"Perseteruan PDIP dan Partai Demokrat secara terbuka juga bisa meningkatkan ketidakpercayaan publik pada partai politik dan DPR yang pada dasarnya adalah dua kekuatan vital dalam demokrasi Indonesia," ujar Dini.

Dia menambahkan, PSI sebagai partai baru berharap sekali partai-partai terdahulu untuk memberi contoh yang dapat diteladani. Dini menyebut, masyarakat sudah bosan menyaksikan konflik politik berkelanjutan yang bertentangan dengan tujuan membangun Indonesia yang damai dan sejahtera.

"PSI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk memerangi korupsi secara kolektif dengan meninggalkan sekat sekat politik yang ada," kata Dini. (H81,F4,J13-50)